

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Penerimaan pendapatan negara sebagai piranti kebijakan fiskal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 22/Pmk.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara terdiri dari berbagai macam pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut yang berfungsi untuk mengalokasikan penerimaan negara yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan negara. Berdasarkan pada tabel 1.1 mengenai anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan negara tahun anggaran 2011-2020 beserta persentase capaian penerimaan pendapatan negara dalam 10 tahun terakhir, dari sisi keuangan negara dan fiskal, selama kurun waktu 2011-2020 terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan negara, penurunan drastis terjadi di tahun 2020, di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp312.850,26 miliar. Sejalan dengan hal tersebut adapun penelitian yang dilakukan oleh Nemeč dan Spacek (2020) menjelaskan laporan keuangan pemerintah Ceko dan Slovakia, realisasi pendapatan di ceko menurun sebesar 25% pada periode januari-juli 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun tabel 1.1 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2011-2020 (disajikan dalam miliaran)

Tahun	Anggaran Pendapatan Negara	Realisasi Pendapatan Negara	Capaian %
2011	Rp 1.169.914,60	Rp 1.210.599,70	103
2012	Rp 1.358.205,00	Rp 1.338.109,60	99
2013	Rp 1.338.109,60	Rp 1.438.891,10	108
2014	Rp 1.635.378,50	Rp 1.550.490,80	95
2015	Rp 1.761.642,80	Rp 1.508.020,37	86
2016	Rp 1.786.225,00	Rp 1.555.934,20	87
2017	Rp 1.736.060,00	Rp 1.666.375,90	96
2018	Rp 1.894.720,30	Rp 1.943.674,90	103
2019	Rp 2.165.111,80	Rp 1.960.633,60	91
2020	Rp 1.699.948,50	Rp 1.647.783,34	97

Sumber : APBN&LKPP (data diolah, 2022)

Kemuidian dapat di lihat pada Tabel 1.1 Pada tahun 2011-2014 anggaran pendapatan dan realisasinya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6% per tahun dan menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan dalam negeri, yang dapat di lihat di tabel 1.2 mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dari berbagai macam sumbernya selama tahun anggaran 2011-2020.

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunannya berasal dari berbagai macam sumber. Pelaksanaan pembangunan nasional melalui APBN, pemerintah membutuhkan dana yang besar dari pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan target dan realisasi sumber penerimaan pendapatan negara tahun anggaran 2011-2020 dapat di lihat bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN, meskipun tidak bisa mencapai target yang ditetapkan, penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya, terkecuali di tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan. Hal tersebut berdasarkan pada tabel 1.2 mengenai anggaran dan realisasi sumber pendapatan negara sebagai berikut :

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sumber Pendapatan Negara
Tahun Anggaran 2011-2020 (dalam rupiah)

Tahun	PENERIMAAN PAJAK			PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			HIBAH		
	Anggaran	Realisasi	% capaian	Anggaran	Realisasi	% capaian	Anggaran	Realisasi	% capaian
2011	878.685,22	873.873,95	99,45	286.567,30	331.471,80	115,67	4.662,11	5.253,94	112,69
2012	1.016.237,34	980.518,12	96,49	341.142,60	351.804,80	103,13	825,09	5.786,75	701,35
2013	1.148.364,68	1.077.306,68	93,81	349.156,70	354.751,90	101,60	4.483,63	6.832,50	152,39
2014	1.246.106,96	1.146.865,77	92,04	386.946,40	398.590,50	103,01	2.325,11	5.034,52	216,53
2015	1.489.255,49	1.240.418,96	83,29	269.075,40	255.628,50	95,00	3.311,90	11.973,04	361,52
2016	1.539.166,24	1.284.970,13	83,48	245.083,60	261.976,40	106,89	1.975,17	8.987,67	455,03
2017	1.472.709,85	1.343.529,84	91,23	260.242,20	311.216,30	119,59	3.108,14	11.629,80	374,17
2018	1.618.095,49	1.518.789,80	93,86	275.428,00	409.320,20	148,61	1.196,87	15.564,90	1300,47
2019	1.786.378,65	1.546.141,90	86,55	378.297,80	408.994,30	108,12	435,31	5.497,30	1262,85
2020	1.861.800,00	1.286.135,32	69,08	294.141,00	343.814,20	116,89	1.300,00	18.832,82	1448,68

Sumber : APBN&LKPP (data diolah, 2022)

Berdasarkan target dan realisasi sumber penerimaan pendapatan negara tahun anggaran 2011-2020 dapat di lihat bahwa realisasi penerimaan negara bukan pajak yang dapat kita simpulkan PNBP hampir setiap tahunnya dapat melebihi target anggaran, di tahun 2015 realisasi PNBP mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun telah mencapai target realisasi PNBP terus mengalami naik turun dari tahun 2011-2020, kemudian jika dibandingkan dengan penerimaan pajak, penerimaan PNBP masih jauh tertinggal dari penerimaan pajak.

Selanjutnya, lebih mendalam membahas mengenai penerimaan negara bukan pajak, adapun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,94% bila dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp66,50 triliun. Salah satu penurunan PNBP yaitu pendapatan dari kekayaan Negara yang dipisahkan, pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh negatif 18,14% atau sebesar Rp14,64 triliun, PNBP lainnya tumbuh negatif 10,69% atau sebesar Rp13,30 triliun. Hal tersebut berdasarkan pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019-2020

Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2019-2020				
Tahun	Realisasi TA 2020 Triliun Rupiah	Realisasi TA 2019 Triliun Rupiah	Pertumbuhan Triliun Rupiah	Kenaikan/ penurunan%
Penerimaan SDA	97,22	154,90	(57,67)	-37,23
Migas	69,71	120,41	(50,70)	-42,11
Non Migas	28,12	33,67	(5,55)	-16,48
Pendapatan dari Kekayaan yang Dipisahkan	66,08	80,72	(14,64)	-18,14
Laba BUMN	44,59	50,63	(6,03)	-11,92
KND Lainnya	21,48	30,09	(8,61)	-28,61
PNB Lainnya	111,20	124,50	(13,30)	-10,69
Pendapatan BLU	69,30	48,86	20,43	41,82
JUMLAH PNBPN	343,81	408,99	(65,18)	-15,94

Sumber : APBN&LKPP (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.3 juga dapat kita ketahui bahwa salah satu sumber PNBPN yaitu hasil kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN atau disebut dividen BUMN bagian pemerintah juga mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan 2019 yaitu tumbuh negatif 11,92% atau sebesar Rp6,03 triliun.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan milik negara. Saham BUMN sebagian besar dimiliki oleh pemerintah atau dengan kata lain pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian pemerintah memperoleh dividen dari BUMN. Pemerintah setiap tahun merencanakan pendapatan yang akan diperoleh dari BUMN sehingga BUMN berupaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Tabel 1.4 menggambarkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 penerimaan dividen yaitu laba BUMN bagian pemerintah melebihi target, kecuali tahun 2013 dimana pencapaian penerimaan meleset dari target.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dijelaskan mengenai badan usaha milik negara merupakan salah satu

pelaku kegiatan dan badan usaha milik negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuannya yaitu BUMN memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Tabel 1.4
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
Tahun Anggaran 2011-2020

Anggaran dan Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (dalam miliar rupiah)			
Tahun	Anggaran	Realisasi	% capaian
2011	28.835,82	28.183,97	97,74
2012	30.776,34	30.797,97	100,07
2013	36.456,49	34.025,60	93,33
2014	40.000,00	40.314,43	100,79
2015	36.956,50	37.643,72	101,86
2016	34.164,00	37.133,17	108,69
2017	41.000,00	43.904,22	107,08
2018	44.695,39	45.060,52	100,82
2019	45.589,30	50.634,21	111,07
2020	65.000,00	44.598,54	101,66

Sumber: APBN&LKPP (data diolah, 2022)

Dapat dilihat dari capaian target dan realisasi yang terjadi yang masih terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015 dan 2020 realisasi laba BUMN mengalami penurunan. Kemudian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu mengenai pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN, yang dimana bagian laba BUMN belum menyumbangkan nilai yang signifikan bagi pendapatan negara dalam kerangka APBN. Kontribusi laba BUMN masih tergolong kecil untuk penerimaan negara jika dibandingkan dari penerimaan pemerintah yang lain.

Sejumlah BUMN mencatatkan kinerja yang kurang memuaskan sepanjang tahun lalu. PT Waskita Karya Tbk dan PT Utama Karya (Persero) menjadi dua yang rugi hingga triliunan rupiah. Sementara tiga BUMN lainnya, yaitu PT PP Tbk,

PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Adhi Karya Tbk masih mencatatkan laba tahun lalu. Namun, jumlahnya merosot tajam, kesemua BUMN tersebut selama ini mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah, utamanya menggarap jalan tol. Kinerja BUMN infrastruktur: PT Waskita Karya & PT Hutama Karya Rugi, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, dan PT Adhi Karya masih cetak laba. (2021, April 2011) diakses pada 25 Maret, 2022 diambil bersumber dari berita : ([https://kumparan.com/kumparanbisnis/kinerja-BUMN-infrastruktur-waskita-and-hk-rugi-PT Pembangunan Perumahan-wika-adhi-masih-cetak-laba-1vWxgEbcfVL/full](https://kumparan.com/kumparanbisnis/kinerja-BUMN-infrastruktur-waskita-and-hk-rugi-PT-Pembangunan-Perumahan-wika-adhi-masih-cetak-laba-1vWxgEbcfVL/full)).

Hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai kontribusi atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara adalah karena sesuai dengan masterplan kementerian BUMN 2010-2014, pemerintah menjadikan BUMN sektor jasa infrastruktur menjadi sektor usaha prioritas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sejalan dengan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 - 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Hal ini menjadi tantangan bagi BUMN sektor jasa infrastruktur agar selalu meningkatkan kinerjanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya dan meningkatkan daya saing perusahaan pada khususnya. Selanjutnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 4 tahun terakhir yang menjadi fokus utama Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur, hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan BUMN sektor jasa infrastruktur yang memiliki peran untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik sektor konstruksi, pembangunan perumahan, dan industri semen yang merupakan pemasok kebutuhan konstruksi. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, total Rp 4.796 triliun diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur (yang ditetapkan pemerintah) pada tahun 2019.

Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya bisa memberikan kontribusi 41 persen untuk pembiayaan, sementara perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) hanya dapat memberikan kontribusi hingga 22 persen.

Analisis bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi bagian pemerintah atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara. BUMN sektor jasa infrastruktur yang menjadi fokus penelitian sebagai perusahaan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pembangunan pada sektor infrastruktur dan sekaligus menjadi salah satu sumber penerimaan negara pada APBN.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Kurniawati (2017:90) yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan dalam pembagian dividen, BUMN terikat oleh jumlah dividen yang ditetapkan Pemerintah, baik dalam jumlah maupun dalam *dividend payout ratio*. Salah satu penghambat optimalisasi penerimaan laba BUMN adalah dominasi kepentingan pemerintah dalam BUMN yang tercermin pada peran BUMN dengan penugasan *Public Service Obligation*. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu :

”ANALISIS KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEKTOR JASA INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN NEGARA INDONESIA SELAMA TAHUN ANGGARAN 2011-2020”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian atas latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kondisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih pada laporan keuangan BUMN sektor jasa infrastruktur dengan metode Trend selama tahun anggaran 2011-2020?
2. Seberapa besar kontribusi laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara selama tahun anggaran 2011-2020?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai kondisi kondisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih pada laporan keuangan BUMN sektor jasa infrastruktur dan kontribusi laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara selama tahun anggaran 2011-2020. Selain itu, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian yaitu pada BUMN sektor jasa infrastruktur.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan kondisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih pada laporan keuangan BUMN sektor jasa infrastruktur dengan metode Trend selama tahun anggaran 2011-2020.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar kontribusi laba BUMN jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara selama tahun anggaran 2011-2020.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan bagi pembaca mengenai kontribusi atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara selama tahun anggaran 2011-2020. Selain itu, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna dalam menjadi referensi atau bukti tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai kontribusi atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara dan berguna sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana terapan akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Bagi instansi pemerintah, dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran dan menjadi alat tolak ukur mengenai kontribusi atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara selama tahun anggaran 2011-2020.
3. Bagi instansi pendidikan, sebagai salah satu pertimbangan, masukan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai kontribusi atas laba BUMN sektor jasa infrastruktur terhadap penerimaan pendapatan negara